

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini berfokus pada kepemimpinan perempuan pertama di Bojonegoro dilihat dari representasi terhadap kepentingan perempuan dalam kebijakan ranah politik lokal. Representasi tersebut dapat berupa kebijakan maupun program yang ditujukan untuk kepentingan perempuan selama masa pemerintahannya. Representasi dalam proses demokrasi merupakan aspek yang harus dipenuhi. Representasi menyangkut wakil dan yang diwakili dalam konteks politik. Kabupaten Bojonegoro dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan pada tahun 2018, untuk pertama kalinya PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) Bojonegoro dimenangkan oleh perempuan yang memegang jabatan bupati periode 2018-2023. Sosok perempuan tersebut ialah Anna Mu'awanah yang berpasangan dengan Budi Irawanto. Keduanya didukung oleh partai PKB dan PDI-P yang tergabung dalam koalisi. Dalam pilkada 2018, Anna Mu'awanah melawan tiga kandidat yakni pasangan nomor urut satu Soehadi Moeljono-Mitroatin yang diusung partai Golkar dan Demokrat. Pasangan dengan nomor urut dua Mahfudhoh-Kuswiyanto dari Hanura, Nasdem dan PAN. Pasangan Basuki-Pudji Dewanto nomor urut empat diusung oleh Gerindra dan PPP.

Dari pilkada tersebut menghasilkan fenomena politik baru lahirnya perempuan pertama sebagai Bupati. Menariknya, Anna Mu'awanah saat kampanye membawa isu gender yang dimasukkan dalam visi misinya. Visi yang dibawa Bupati Anna Mu'awanah ialah menjadikan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan, dan sosial budaya lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera, dan berdaya saing. Sedangkan misinya berfokus pada tujuh poin yang salah satunya berspektif gender. Misi yang berspektif gender terdapat pada poin keempat yaitu mewujudkan rasa aman dan keperpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum duafa. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri mengingat isu gender jarang diangkat dan diadopsi dalam politik.

Studi mengenai kepemimpinan perempuan sangat penting untuk dikaji, dimana perempuan masih sedikit yang berhasil menduduki jabatan politik eksekutif di ranah lokal. Dari data pilkada serentak tahun 2018, setidaknya terdapat 110 perempuan yang menjadi

kandidat sebagai kepala daerah.¹ Dari jumlah 110 perempuan yang mengikuti pilkada serentak hanya ada 31 perempuan terpilih yang terdiri dari 14 sebagai kepala daerah dan 17 sebagai wakil kepala daerah. Dari total 31 perempuan yang berhasil memenangkan jabatan kepala daerah, hanya ada 11 yang menyelipkan kata perempuan kedalam agenda visi misinya. Salah satunya ialah Anna Mu'awanah sebagai Bupati terpilih Bojonegoro tahun 2018. Ia menyematkan kata perempuan yang disisipkan kedalam misinya di poin keempat mewujudkan rasa keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa.²

Keberadaan perempuan yang relatif sedikit dalam politik akan menghadapi hambatan dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Terlebih jika perempuan hanya duduk di legislatif yang perannya akan banyak menghadirkan kepentingan partai untuk dibawa dalam legislatif. Suara minoritas perempuan akan sulit menembus dinding legislatif dalam memperjuangkan suara perempuan. Akses dalam membuat kebijakan dalam legislatif akan terbatas karena jumlah perempuan dilihat dari segi kuantitatif relative sedikit. Berbeda jika perempuan menduduki jabatan eksekutif di ranah politik lokal sebagai kepala daerah, mereka akan memiliki wewenang lebih dalam memperjuangkan kepentingannya. Mereka tidak perlu mendapatkan persetujuan layaknya di legislatif. Kepala daerah memiliki kewenangan dan agenda sendiri yang dapat dijalankan di daerahnya. Asumsinya jika perempuan sebagai kepala daerah mereka akan lebih mudah dalam menghadirkan kebijakan yang berbasis gender dibandingkan dengan perjuangan mereka di legislatif. Hadirnya perempuan dalam mengisi kursi kepala daerah merupakan harapan awal untuk memudahkan dalam membuat kebijakan maupun program yang ditujukan untuk perempuan.

Dalam hal ini, perempuan diharapkan dapat merepresentasikan kepemimpinannya secara substantif. Ada keuntungan bagi perempuan yang menjadi kepala daerah untuk lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan yang akan mereka hasilkan. Mereka dapat memasukkan kepentingan perempuan dalam agenda program yang ada dalam visi misinya. Perempuan sebagai kepala daerah memiliki posibilitas untuk merepresentasikan kepentingan-kepentingan

¹ Ayomi Amindoni, "Keterwakilan Perempuan di Pilkada 2018 Naik, Keberpihakan pada Agenda dan Isu Perempuan Masih Rendah", *BBC Indonesia*, 22 Februari 2018, <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-43139445.amp> (diakses pada 15 November 2021).

² Muh.Irfan, "ini tujuh misi pembangunan Bojonegoro lima tahun kedepan", *Pemkab Bojonegoro*, 8 November 2018, <https://bojonegorokab.go.id/berita/3487/ini-tujuh-misi-pembangunan-bojonegoro-lima-tahun-kedepan> (diakses 28 november 2022)

perempuan karena memiliki otoritas yang tinggi. Kepala daerah perempuan dapat memasukkan agenda kebijakan perempuan dalam visi misinya yang nanti diturunkan kedalam program kerja. Kepala daerah perempuan tidak perlu bersusah payah layaknya di DPRD yang membutuhkan dukungan banyak fraksi untuk membuat kebijakan berspektif gender. Jumlah mereka yang relative kecil di DPRD akan sangat sulit untuk membuat kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan gender di kabupaten atau kota. Mereka membutuhkan suara yang banyak untuk dapat memperjuangkan kepentingan perempuan.

Dalam penelitian terdahulu, banyak yang berfokus pada perempuan yang dianalisis dalam konteks lembaga legislatif baik tingkat lokal maupun pusat. Ardiansa (2017) melakukan penelitian dengan tujuan mengungkapkan permasalahan representasi perempuan di Indonesia dan memberikan alternatif pijakan untuk meningkatkan angka representasi perempuan.³ Menurut Nimrah (2015), kegagalan perempuan dalam masuk di dunia politik terutama legislatif dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti patriarki, partai politik, media dan tidak adanya jejaring organisasi maupun partai untuk memperjuangkan representasi perempuan.⁴ Hal tersebut berdampak pada spekulasi yang ada di masyarakat bahwa politik identik dengan kaum laki-laki dan perempuan hanya pantas berada di sektor domestik.

Menurut Ekawati (2016), perempuan yang masuk ke ranah politik terutama di legislatif akan terjebak didalam dominasi maskulin dan menemui kendala dari segi sosial, ekonomi, ideologi serta adanya kuota 30 persen di legislatif hanya merupakan bentuk formalitas untuk memenuhi target perempuan.⁵ Menurut Novitasari (2017) melakukan penelitian di Kota Batu dengan hasil calon kepala daerah dalam pilkada membawa isu gender, blusukan, pembentukan citra mandiri sebagai cara kampanye yang ampuh.⁶ Dalam hal ini, studi terdahulu lebih memfokuskan pada perempuan yang dianalisis dalam konteks legislatif. Dalam penelitian terdahulu lebih menganalisis ketidakmampuan perempuan di legislatif dan pengaruh budaya patriarki. Menganalisis mengenai ketidakmampuan pemerintah maupun

³ Dirga Ardiansa, "Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia", *Jurnal Politik 2*, no.1 (2017): 72

⁴ Siti Nimrah dan Sakaria Sakaria, "Perempuan dan Budaya Patriarki dalam politik (Studi Kasus Kegagalan caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014)", *Jurnal The Politics 1*, no.2 (2015):173.

⁵ Esty Ekawati, "Dari Representasi Politik Formal Ke Representasi Politik Non-Elektoral", *Jurnal Penelitian Politik 11*, no.2 (2016): 136.

⁶ Rika Novitasari & Tikka Dessy Harsanti, "Strategi Calon Kepala Daerah Perempuan Dalam Kontestasi Politik Di Kota Batu Tahun 2017", *WASKITA 3*, no.1 (2019): 30.

partai politik untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan. Serta melakukan analisis terhadap bagaimana pola rekrutmen politik saat akan masuk di legislatif.

Untuk itu, penulis mencoba memberikan fokus penelitian yang berbeda, dimana menganalisis perempuan yang duduk di eksekutif tingkat lokal yang terepresentasikan sebagai kepala daerah dengan mengarah pada implementasi konsep dan perjuangan gender di politik yang dimasukkan kedalam kebijakan dan programnya. Perbedaan yang mendasar mengenai kedudukan perempuan dalam lokal dan pusat ialah dalam pemilu legislatif terdapat kuota perempuan yang mungkin akan terepresentasi. Partai politik akan menargetkan kader perempuan walaupun hanya sebagai formalitas dalam pemenuhan kuota 30% yang disediakan oleh pemerintah. Secara tidak langsung mereka menyiapkan kader perempuan untuk dijadikan kandidat dalam pemilihan legislatif agar aturan tersebut dapat terpenuhi. Namun, berbeda pada ranah politik lokal kompetisi pada pilkada didasarkan pada kompetisi yang *fair* dan tidak ada aturan mengenai kuota gender. Perempuan yang ingin mencalonkan kepala daerah memiliki beban ganda pada saat akan masuk dalam politik. Beban pertama yang dipikul ialah kompetisi pilkada yang *fair* dan kedua berjuang melawan stereotip gender. Mereka tidak hanya memenuhi tuntutan kuota gender layaknya dalam pemilu legislatif namun lebih dari itu disamping melawan stereotip namun juga berjuang merebut hati pemilih. Untuk itu, peneliti akan memfokuskan penelitian dengan melihat kepemimpinan Anna Mu'awanah sebagai kepala daerah dilihat dari perspektif gender. Keberadaan Anna Mu'awanah selaku kepala daerah perempuan akan dilihat bagaimana ia merepresentasikan kepentingan perempuan di politik lokal. Mengeksplorasi kepemimpinannya yang telah berjalan lebih dari tiga tahun dengan melihat kemungkinan dalam memperjuangkan perempuan. Mengingat studi tentang kepemimpinan masih banyak yang cenderung netral gender. Peneliti akan meneliti mengenai kajian kepemimpinan yang memfokuskan pada kepemimpinan perempuan sebagai kepala daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kepemimpinan Bupati Anna Mu'awanah memiliki kemungkinan untuk merepresentasikan kebijakan yang berspektif gender?
2. Apa kepentingan-kepentingan perempuan yang sudah direpresentasikan oleh Anna Mu'awanah selaku Bupati Bojonegoro?
3. Apakah stereotip yang melekat pada kepemimpinan perempuan menjadi penghambat atau keuntungan bagi representasi kepentingan berspektif gender?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mencoba untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah di kepemimpinan bupati perempuan pertama di Bojonegoro memiliki kemungkinan untuk merepresentasikan kebijakan yang berspektif gender.
2. Untuk mengetahui apa saja kepentingan-kepentingan perempuan yang sudah direpresentasikan oleh Bupati Anna Mu'awanah melalui kebijakan dan programnya.
3. Untuk mengetahui apakah stereotip yang melekat pada perempuan menjadi penghalang atau justru menjadi keuntungan bagi kepemimpinan perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi akademis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Secara Akademis

- a. Selama ini, kajian kepemimpinan cenderung netral gender. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan dan pembuktian bahwa kajian gender dapat dimasukkan dalam studi kepemimpinan politik yang tercermin sebagai kepala daerah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu politik khususnya dalam penelitian kepemimpinan politik perempuan di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif dan memicu untuk melakukan penelitian dalam bidang yang sama terkait politik gender agar studi politik gender dapat mengalami perkembangan dan pembaruan.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

- a. Dengan adanya penelitian terkait representasi politik bupati perempuan di Bojonegoro, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait yakni Bupati Anna Mu'awanah dalam membuat kebijakan untuk memperhatikan aspek gender demi

memecahkan persoalan gender di Bojonegoro. Mengingat di Bojonegoro masih banyak kasus terkait ketidaksetaraan dan kekerasan gender. Untuk itu Bupati diharapkan dapat mengatasi persoalan gender tersebut melalui perjuangannya dalam membuat kebijakan maupun program yang berbasis kepedulian gender.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi seluruh kepala daerah khususnya perempuan untuk memperhatikan kebijakan yang berafiliasi untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Kepala daerah memiliki peluang untuk memperjuangkan kepentingan gender dibandingkan dengan keberadaan mereka di legislatif. Peluang tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membuat produk politik berupa program maupun kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi masalah gender di daerahnya.
- c. Penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat yang ingin mengetahui implementasi kebijakan terkait praktik politik gender dalam kepemimpinan politik.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Konsep Gender

Gender merupakan sebuah perbedaan peranan, status maupun fungsi yang mengarah pada laki-laki dan perempuan dari hasil konstruksi sosial.⁷ Berbeda dengan jenis kelamin yang pemberiannya bersifat kodrati yang secara biologis harus diterima, maka gender dapat berubah tergantung waktu dan kondisi dalam kehidupan sosial. Dalam konteks pegiat kesetaraan gender dapat didefinisikan jenis kelamin berdasar pada definisi yang mengarah pada sebatas seks sebagai jenis kelamin biologis laki-laki dan perempuan berdasarkan alat kelamin yang dimilikinya sejak lahir.⁸ Sedangkan gender dalam jenis kelamin sosial merupakan hasil dari konstruksi sosial berupa feminisme yang ditujukan bagi perempuan dan maskulinitas yang mengarah pada laki-laki.⁹ Dalam kehidupan masyarakat, keberadaan laki-laki dan perempuan memiliki permasalahan tersendiri terlebih dalam politik. Politik diidentikkan dengan laki-laki yang berdampak pada praktik politik maskulin. Dalam Rahmaturrizqi, Judith Squires (1999) menyatakan bahwa perempuan mengalami

⁷ Harien Puspitawati, "Konsep, Teori dan Analisis Gender", Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian (2013):12.

⁸ Moh.Khuza', "Problem definisi gender: Kajian atas konsep nature dan nurture", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Ilmiah* 11, no.1 (2013):104.

⁹ Ibid.

ketertinggalan dalam aktivitas politik, mereka dihambat untuk mendefinisikan aktivitas mereka sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari politik.¹⁰

Kesulitan perempuan untuk masuk dalam politik disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kondisi politik yang maskulin. Kedua, stereotip gender yang melekat pada perempuan bahwa mereka hanya dapat bekerja di sektor domestik. Sektor yang berkaitan dengan domestik seperti pekerjaan rumah tangga yang dibebankan pada perempuan. Dalam hal itu menimbulkan asumsi bahwa politik merupakan kegiatan yang cocok dengan laki-laki. Perempuan cocoknya bekerja untuk mengurus rumah tangga dan anak. Realitas sosial tersebut berdampak pada pembagian peran atas dasar gender dan menghasilkan keadaan yang tidak seimbang yang berakibat pada perempuan yang ter subordinasi.¹¹ Keadaan tersebut sering disebut sebagai ketimpangan gender.¹² Chafetz (1999), ketidakseimbangan gender yang disebut *gender inequality* mengacu pada ketidakseimbangan yang berhubungan dengan akses sumber yang langka di kehidupan masyarakat. Sumber-sumber tersebut dapat berupa peranan, kekuasaan, kesempatan mendapat pendidikan, kesehatan yang sama bahkan mengarah pada *prestise* yang semuanya didasarkan pada gender. Mengutip pendapat Moore (1994:10-11) dalam Abdulloh dijelaskan bahwa subordinasi terhadap perempuan bukan hanya didasarkan pada aspek kultural melainkan juga disebabkan pada akar pembagian kerja yang didasarkan atas gender.

Dalam hal ini, keberadaan problem gender selain berkaitan dengan hal diatas, gender juga berkaitan erat dengan budaya patriarki dalam masyarakat yang membentuknya. Budaya patriarki yang berkembang di masyarakat menjadi indikator untuk melakukan sesuatu dan menjadi pedoman kepantasan dalam bertindak. Patriarki tidak hanya ada dalam ruang lingkup politik namun dapat juga berada dalam ekonomi, hukum bahkan dalam pendidikan. Mereka dapat mengganggu sistem kehidupan terutama keberadaan perempuan yang akan dikekang dalam hal kebebasan. Hal tersebut berdampak pada pembatasan sosial yang merugikan perempuan. Dalam konteks politik, menghasilkan pandangan bahwa dunia politik identik dengan laki-laki. Sehingga dominasi laki-laki dalam politik akan menghasilkan produk kebijakan yang bersifat maskulin. Perempuan akan termarginalkan dan ter subordinasi akibat produk kebijakan yang sifatnya maskulin tersebut. Budaya patriarki yang kuat berdampak pada keberadaan perempuan yang sulit masuk dalam politik. Untuk itu, pemerintah

¹⁰ Rahmaurizqi, C.Nisa, & Fathul Lubabin Nurul, " Gender dan Perilaku memilih: sebuah kajian psikologi politik", *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* 3, no.1 (2012):50.

¹¹ Irwan Abdulloh, "Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial", *Humaniora* 15, no.3 (2003):266.

¹² Ibid.

memberikan alternatif kuota gender yang dikhususkan untuk perempuan agar dapat terwakili di legislatif. Kuota disediakan sebanyak 30% dilegislatif. Namun, kuota tersebut belum efektif menangani isu perempuan. Bahkan dalam sejarah politik di Indonesia belum pernah tercapai 30%. Mereka yang duduk di legislatif akan sulit memperjuangkan kepentingan mereka karena sedikitnya kuota gender yang terpenuhi. Perempuan didefinisikan sebagai mereka yang mengerjakan sektor domestik. Keberadaan mereka dipandang dibawah laki-laki. Dapat disimpulkan secara mendasar perbedaan yang kontras pada jenis kelamin dan gender terletak pada sifat dan peranannya dalam masyarakat serta adanya pengaruh patriarki yang menimbulkan problem gender di Indonesia.

1.5.2 Kepemimpinan Politik

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama.¹³ Kepemimpinan merupakan aktivitas untuk mempengaruhi masyarakat atau kelompok.¹⁴ Dalam hal ini kepemimpinan berhubungan dengan orang yang memiliki kekuatan dan orang yang dipengaruhi. Untuk itu, kepemimpinan dalam masyarakat bisa ditemui diberbagai sektor kehidupan. Misalnya dalam tingkat sekolah, organisasi bahkan dalam politik. Kepemimpinan politik berhubungan dengan suprastruktur politik.¹⁵ Kepemimpinan politik dengan kepemimpinan lainnya tentunya memiliki perbedaan dalam hal penggunaan wewenang dan bagaimana proses kepemimpinan tersebut didapat. Dalam hal ini, kepemimpinan politik harus melalui proses sirkulasi sesuai dengan aturan yang berlangsung untuk menghasilkan pemimpin politis yang baik. Dalam demokrasi, kepemimpinan politik dapat lahir akibat hasil dari pemilihan umum. Pemilihan umum dianggap sebagai indikator dalam negara demokratis. Kepemimpinan politik dapat berupa mereka yang terpilih sebagai pejabat publik seperti kepala daerah, presiden dan lain sebagainya.

Kepemimpinan politik saat ini tidak dapat lagi dikhususkan berdasarkan jenis kelamin yang melekat. Kesempatan yang sama terbuka bagi perempuan untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin perempuan. Mereka dapat berjuang dan berkompetisi untuk mendapatkan kepemimpinan politik. Namun, realitasnya perlu perjuangan yang ekstra bagi perempuan

¹³ Fridayana Yidiaatmaja, "Kepemimpinan:Konsep, Teori Dan Karakternya", *Media Komunikasi FPIPS* 12, no.2 (2013):30.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Hendri Saputra, "Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan", PhD diss, IAIN Bengkulu, 2016.

untuk bisa mendapatkan jabatan politis tersebut. Adanya stereotip gender yang terbentuk dalam masyarakat menyebabkan beban moral bagi perempuan untuk terjun dalam dunia politik. Dapat diketahui bahwa keberadaan perempuan dalam politik masih sangat sedikit. Padahal, partisipasi perempuan sangat dibutuhkan dalam politik untuk menciptakan kebijakan yang seimbang gender. Kebijakan berspektif gender dapat mengurangi problem terkait ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan gender. Partisipasi perempuan dibutuhkan untuk menghasilkan produk kebijakan yang sifatnya memihak perempuan. Untuk itu, perlunya perempuan untuk terlibat dalam proses politik agar kebijakan yang dihasilkan tidak selalu maskulin. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan politik merupakan suatu proses untuk mempengaruhi orang lain, masyarakat maupun kelompok dalam ranah politik atau suprastruktur politik. Dalam hal ini, dapat dilihat sirkulasinya melalui cara-cara yang demokratis yang berlangsung di Indonesia melalui pemilihan umum untuk menghasilkan pemimpin politik yang demokratis.

1.5.3 Kepentingan Perempuan

Kepentingan perempuan dalam konteks politik menyangkut mengenai isu-isu terkait perjuangan ketidakadilan gender di kehidupan masyarakat. Perempuan sering mengalami eksploitasi dan diskriminasi. Permasalahan diskriminasi dibuktikan dengan angka kekerasan seksual dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang tinggi di kabupaten dan pusat. Di dalam kehidupan sosial masyarakat, perempuan masih mengalami kendala dan terkadang belum mendapatkan akses yang sama sebagaimana laki-laki. Kesulitan mendapat akses tersebut bukan hanya terjadi dalam lingkungan politik namun juga pada pendidikan, kesehatan dan di dunia kerja. Hal tersebut menjadi problem gender yang sampai saat ini masih dirasakan. Perempuan seringkali termarginalkan akibat problem tersebut. Mereka dianggap dibawah laki-laki dan kesulitan mendapat akses di bidang tertentu. Kepentingan perempuan menyangkut mengenai isu-isu diskriminasi yang sering dirasakan perempuan itu sendiri baik dalam kehidupan sosial, ekonomi dan bidang lainnya. Misalnya di bidang ekonomi, perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan di dunia kerja. Perempuan dapat memilih bekerja dimanapun serta menghilangkan konsep bahwa perempuan hanya dapat bekerja di sektor domestik. Perempuan juga memiliki kepentingan yang berbeda dengan laki-laki. Pembagian kerja yang didasarkan atas gender dapat merugikan perempuan. Kebanyakan beberapa pekerjaan diasumsikan hanya cocok dilakukan oleh laki-laki. Padahal,

perempuan seharusnya juga memiliki kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pilihan mereka. Pembagian kerja atas dasar gender seringkali merugikan perempuan.

Selain itu, budaya patriarki yang seakan langgeng berdampak pada termarginalnya perempuan hingga berdampak pada diskriminasi dan eksploitasi. Angka kekerasan yang tinggi maupun KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang merugikan perempuan perlu diatasi. Perempuan juga sering tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini terjadi karena minimnya jumlah perempuan yang ikut dalam politik. Dengan adanya produk kebijakan untuk melindungi perempuan akan berdampak pada terciptanya kehidupan yang seimbang gender. Untuk itu, perempuan secara garis besar memiliki kepentingan terkait isu ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan gender dan membutuhkan ruang perlindungan agar tidak terjadi kasus diskriminasi baik dalam rumah tangga maupun dalam konteks kehidupan sehari-hari diberbagai sektor. Perempuan juga perlu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan dapat memperhatikan aspek gender.

1.5.4 Kebijakan Berspektif Gender

Dalam politik lokal, kebijakan berspektif gender dapat didukung dengan adanya kepala daerah yang memiliki kepedulian gender. Terlebih jika kepala daerah dipegang oleh perempuan dapat memberikan harapan bagi lahirnya kebijakan yang merepresentasikan kepentingan perempuan. Kepala daerah perempuan akan cenderung mengerti dengan kebutuhan dan peluang mengenai kebijakan yang berbasis gender. Kepala daerah dapat membuat kebijakan maupun program yang sifatnya responsif gender. Kebijakan tersebut dapat berupa penyusunan program atau kegiatan yang menargetkan sasaran berupa perempuan. Penanganan masalah terkait kekerasan dan pelecehan seksual, kesenjangan perempuan dan kebijakan berupa perlindungan bagi perempuan. Kebijakan berspektif gender juga berkaitan dengan pembangunan yang ditujukan untuk perempuan serta untuk mengejar isu ketertinggalan mengenai jenis kelamin. Dalam hal ini, kepala daerah memiliki peran penting untuk menunjukkan kebijakan maupun programnya yang berspektif gender. Kepala daerah memiliki otoritas tinggi dan keleluasaan dalam menghasilkan kebijakan yang ramah gender. Untuk itu perlunya proses perencanaan ataupun gender *budget* demi menunjang kebijakan berspektif gender.

Adapun kebijakan yang berspektif gender ialah semua kebijakan yang ditujukan untuk menangani permasalahan gender dan dapat mendukung perempuan di semua sektor

kehidupan. Salah satunya ialah adanya perlindungan bagi perempuan agar terhindar dari eksploitasi dan diskriminasi. Perlindungan perempuan dapat tertuang dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan bupati. Dengan adanya payung hukum yang ditujukan untuk melindungi perempuan, maka akan terciptanya lingkungan yang ramah bagi perempuan. Kebijakan berspektif gender lainnya dapat pula tertuang dalam bidang pendidikan formal maupun non formal. Pelatihan-pelatihan untuk perempuan dalam segala bidang dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang berspektif gender. Dengan adanya kebijakan khusus perlindungan akan menekan angka kekerasan perempuan. Selain itu kebijakan berspektif gender juga dapat ditujukan untuk memberikan ruang kebebasan bagi perempuan baik pelatihan, perkumpulan maupun akses dalam mendapat kesempatan yang sama dibidang ekonomi. Dalam politik lokal, agenda gender dapat dimasukkan dalam gender *budget* yang tujuannya dikhususkan untuk anggaran yang berkaitan dengan permasalahan ketidakseimbangan gender di semua aspek. Dengan adanya gender *budget* akan menghasilkan program yang terencana dan terstruktur penggunaan keuangan yang khusus untuk menangani permasalahan gender. Kepala daerah juga berperan penting dalam menyusun agenda dan program terkait penyelesaian ketimpangan gender melalui visi misinya yang nantinya diturunkan kedalam program kerja selama masa kepemimpinannya.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Teori Representasi Politik

Hanna Pitkin merupakan ilmuwan politik pertama yang membawa konsep mengenai representasi politik. Teori representasi diidentikkan dengan 2 hal yakni otoritas dan akuntabilitas. Pemberian otoritas nanti akan dijadikan dasar tindakan bagi para wakil yang berhasil terpilih. Konsepsi sederhana terkait keterwakilan atau representasi merujuk pada upaya untuk menghadirkan kembali.¹⁶ Dalam hal ini terdapat hubungan antara representator dengan mereka yang diwakili kepentingannya. Dalam konteks penelitian kali ini, representasi yang diteliti merupakan representasi yang berhubungan dengan kepentingan perempuan yang direpresentasikan oleh kepala daerah perempuan. Bagaimana kepala daerah bertindak sebagai wakil di politik lokal. Kepentingan perempuan merupakan kepentingan yang memperjuangkan hak-hak perempuan atas ketidakseimbangannya terhadap laki-laki. Dari aspek politik, kepentingan perempuan dapat dicerminkan dengan perjuangan mereka agar

¹⁶ Hanna F. Pitkin, *The concept of representation*, (London: University of California Press, 1967):8.

memperoleh perlindungan dan hak yang sama untuk terlibat dalam proses politik. Perempuan perlu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang bisa berdampak pada kebijakan yang sensitive gender. Dari segi ekonomi, pembagian kerja acapkali dihadirkan atas dasar gender. Hal tersebut merupakan salah satu contoh adanya diskriminasi terhadap perempuan dan mereka akan tersubordinasi. Kepentingan perempuan yang acapkali diabaikan dan jarang diperjuangkan dalam ranah politik membawa konsekuensi budaya yang menunjukkan ketertinggalan perempuan di semua sektor kehidupan. Anne Philipps menyatakan bahwa representasi politik merupakan hal penting yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan. Perlu ditegaskan bahwa perwakilan kepentingan mengandung arti *Justice and equality* bagi representasi perempuan dikarenakan mereka tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Untuk itu jika berbicara mengenai representasi politik untuk kesetaraan gender maka partisipasi perempuan dalam politik perlu dihadirkan.

Bagi Hanna Pitkin, penilaian tentang perwakilan akan tergantung pada masalah apa yang dihadapi dan lingkungan politik dimana wakil tersebut bertindak.¹⁷ Pitkin memberikan tiga hal untuk seseorang dapat dikatakan sebagai wakil dalam demokrasi.¹⁸ Pertama, otorisasi atau *Authorization*. Kedua, Substantif (Substantive) yang mengarah pada tindakan wakil sebenarnya. Ketiga, *Accountability* atau pertanggung jawaban wakil. Terdapat kunci representasi yang diajukan oleh Pitkin. Pertama, *representative* atau yang mewakili. Kedua, *the represented* (yang diwakili). Ketiga, kepentingan apa yang diwakili dan terakhir konteks atau setting politik. Wakil atau yang disebut *representative* merujuk pada seseorang atau sekelompok orang yang bertugas untuk mewakili dalam lembaga formal maupun informal. Mereka yang menjadi wakil dapat berupa kepala daerah, DPRD maupun mereka yang ada di lembaga non formal. Kunci representasi politik kedua ialah yang diwakili merujuk pada sekelompok orang yang diwakili dimana mereka merupakan konstituen atau klien.¹⁹ Konsepsi ketiga terdapat kepentingan baik berupa pendapat, keinginan atau preferensi politik, pandangan dan gagasan masyarakat yang diwakili. Terakhir ialah adanya konteks politik yang mendasari perwakilan tersebut bisa ada. Keempat tersebut merupakan kunci dari representasi politik yang nantinya dapat menunjang representasi berfungsi dengan baik.

¹⁷ Suzanne Dovi, "Hanna Pitkin, the concept of representation", *the handbook of classics in contemporary political theory* (2015).

¹⁸ Juhana Nasrudin, "Politik Identitas dan Representasi politik, *Jurnal studi agama-agama* 1, no 1(2018):38.

¹⁹ Adelia Fitri, "representasi kelompok disabilitas dalam pencalegan tahun 2019), *Jurnal Transformative* 5, no.2 (2019):40.

Lebih lanjut Pitkin memberikan empat kategori representasi. Pertama, representasi formalistic yang menekankan pada akuntabilitas dan otorisasi. Otorisasi dalam pandangan Pitkin terletak pada bagaimana sosok representator mendapatkan jabatan tersebut. Sedangkan akuntabilitas berhubungan dengan pertanggung jawaban seorang wakil terhadap otorisasi yang diperolehnya. Kedua, representasi simbolik yang diartikan sebagai bagaimana mereka yang bertindak sebagai wakil mampu menghadirkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Dalam sudut pandang representasi simbolik, peran seorang wakil akan didasarkan pada respon emosi. Para wakil akan bertindak atau *stand for* kepada mereka yang diwakili atas dasar kesamaan identitas maupun budaya. Ketiga, representasi deskriptif yang merujuk pada sejauh mana mereka menyampaikan aspirasi dan gagasan para wakil mereka. Para wakil dalam tipologi ini dipandang memiliki kesamaan dengan yang diwakilinya. Terakhir, representasi substantive yang menekankan pada sosok wakil yang memperjuangkan isu atau aspirasi wakilnya kedalam agenda kebijakan. Bagi Pitkin, penilaian tentang perwakilan akan bergantung pada masalah yang dihadapi dan lingkungan politik dimana sosok wakil bertindak.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian mengenai kepemimpinan bupati perempuan pertama di Bojonegoro dalam merepresentasikan kepentingan perempuan yang dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode tersebut dipilih karena memiliki korelasi untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial secara menyeluruh. Metode penelitian kualitatif memberikan posisi peneliti sebagai instrument kunci penelitian. Penelitian ini nantinya menekankan pada makna. Peneliti menggunakan metode kualitatif dikarenakan untuk mendapatkan data mendalam yang dapat memenuhi apa yang dibutuhkan terkait penelitian kepemimpinan Bupati Anna Mu'awanah di Bojonegoro.

1.7.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis terkait praktik politik perempuan di Bojonegoro yang direpresentasikan oleh Anna Mu'awanah sebagai Bupati perempuan pertama yang ada di Bojonegoro. Peneliti memfokuskan pada kebijakan dan program-program yang mengarah pada representasi kepentingan perempuan. Terpilihnya Anna Mu'awanah di pilkada Bojonegoro tahun 2018 menyumbang fenomena politik baru di

Bojonegoro. Untuk pertama kalinya telah lahir sosok pemimpin perempuan. Metode yang digunakan peneliti merupakan metode kualitatif. Peneliti memfokuskan penelitian untuk mengetahui posibilitas Anna Mu'awanah dalam memperjuangkan dan merepresentasikan kepentingan perempuan di Bojonegoro. Kepentingan-kepentingan perempuan apa saja yang telah Anna tuangkan dalam kebijakan maupun programnya. Untuk memfokuskan mengenai stereotip yang melekat pada diri perempuan menjadikan suatu penghambat atau keuntungan bagi Anna Mu'awanah dalam membuat kebijakan berspektif gender. Mengingat perempuan jumlahnya secara kuantitatif relatif sedikit dalam ranah politik lokal.

1.7.2 Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif peneliti memiliki peran penting yang disebut dengan instrument kunci.²⁰ Dalam melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan terkait penelitian terhadap kepemimpinan Anna, teknik yang digunakan ialah teknik triangulasi. Metode kualitatif yang digunakan dalam hal ini menekankan pada makna.²¹ Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan mengandung akan makna. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang memiliki desain dan format yang baku, maka metode kualitatif tidak demikian. Metode ini memberikan penulis untuk berperan dalam memahami realitas-realitas sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif cocok digunakan untuk meneliti fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari seperti kehidupan politik. Dalam hal ini, untuk menemukan data terkait penelitian politik perempuan yang dilakukan penulis maka metode ini diharapkan mampu untuk memenuhi data yang dibutuhkan oleh penulis. Pertama yang dilakukan penulis tentunya menemukan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti serta nantinya akan dianalisis di bagian akhir penelitian setelah peneliti berhasil menemukan data yang dibutuhkan.

Penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti untuk menemukan data berupa fakta dan realitas sosial terkait kepemimpinan Anna Mu'awanah sebagai bupati perempuan pertama di Bojonegoro. Dengan bantuan metode kualitatif, penulis dapat menemukan realitas dan fakta untuk dianalisis dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian penulis. Dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif digunakan penulis dalam penelitiannya karena untuk menjelaskan fenomena dan realitas sosial terkait kepemimpinan Anna Mu'awanah

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2015), 1.

²¹ Ibid., hlm. 3

dalam merepresentasikan kepentingan perempuan. Dengan menggunakan metode tersebut peneliti menemukan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis terletak di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat fenomena politik baru lahirnya perempuan pertama sebagai bupati. Anna Mu'awanah yang berhasil memenangkan pilkada Bojonegoro tahun 2018 membawa visi misi yang berspektif gender. Untuk itu, penulis akan menjadikan Bojonegoro sebagai lokasi penelitian untuk diketahui bagaimana sosok Bupati perempuan merepresentasikan kepentingan perempuan dalam bentuk kebijakan maupun programnya selama masa kepemimpinannya. Mengingat, kepemimpinan perempuan diharapkan dapat mampu membawa perubahan baik terutama bagi kesetaraan gender. Isu-isu dan problem terkait perempuan dapat di angkat dan diatasi dengan adanya kepala daerah perempuan. Dengan adanya kepemimpinan perempuan, diharapkan dapat mengatasi problem terkait perempuan itu sendiri.

1.7.4 Subjek Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis maka subjek penelitian berperan sangat penting. Berikut subjek penelitian yang diwawancarai peneliti untuk mendapatkan data dan informasi terkait penelitian.

- a. Erry Tjatur Hananto Kasubid Pembangunan Inovasi dan Teknologi Bappeda Bojonegoro

Kasubid Pembangunan Inovasi Dan Teknologi Bappeda Kabupaten Bojonegoro dipilih penulis menjadi salah satu target informan karena beliau secara langsung ditunjuk oleh Anna Mu'awanah untuk mewakili informasi terkait program kerja perempuan. Dengan segala macam kesibukan Bupati, maka dalam hal ini Bappeda diperintahkan Bupati untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait program kerja sensitive gender.

- b. Drs. Supriyanto,M.M (Kader PDIP)

Subjek wawancara yang dibutuhkan penulis untuk memberikan informasi ialah salah satunya kader partai PDIP. Dimana, partai ini juga merupakan partai yang berkoalisi dengan

PKB yang merupakan pengusung dari Anna Mu'awanah. PDI-P mengusung calon Budi Irawanto sebagai wakil Bupati yang berpasangan dengan Anna Mu'awanah di PILBUP(pemilihan Bupati) tahun 2018. Target kader PDIP dipilih juga untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Anna Mu'awanah terkait representasi perempuan. Mereka dapat memberikan informasi dan *crosscheck* kebijakan apa saja yang telah dilakukan. Untuk mengetahui kepemimpinan Anna Mu'awanah yang telah berlangsung tiga tahun lebih. Drs. Supriyanto, M.M memiliki banyak informasi karena sepak terjangnya di PDI-P telah terbilang cukup lama. Beliau juga pernah menjadi anggota dewan atau DPRD Bojonegoro fraksi PDI-P. Drs. Supriyadi, M.M juga tergabung menjadi tim sukses Anna Mu'awanah dan Budi Irawanto di Pilbup 2018.

c. M.Zainuddin (Wakil Ketua DPC PKB Bojonegoro)

Wakil Ketua DPC PKB dijadikan target informan oleh peneliti untuk mengetahui awal mulanya partai merekomendasikan Anna Mu'awanah untuk diusung sebagai Bupati dalam pilkada 2018. Peneliti ingin mengetahui proses pencalonan Anna dan informasi terkait sosok Anna dari beberapa sisi yang menarik perhatian partai PKB. Perjuangan-perjuangan Anna untuk PKB sebelum dan sesudah menjadi Bupati Bojonegoro. Serta untuk mengetahui sosok Anna dimata partai setelah menjadi bupati Bojonegoro. Menanyakan program Anna terkait perempuan dan pandangan partai tentang kepemimpinannya yang telah berjalan selama tiga tahun lebih. M.Zainuddin juga tergabung dalam kepengurusan partai dan telah bergabung di PKB sejak 2018. Beliaunya sangat dekat dengan Anna sehingga mengetahui informasi terkait kepemimpinan Anna Mu'awanah.

d. Hj.Nyai Zulaichah (Katua Muslimat NU)

Ketua muslimat NU menjadi target informan dalam penelitian ini dikarenakan mereka salah satu sasaran program yang berbasis perempuan yang diperjuangkan oleh Anna. Informasi ini dibutuhkan untuk mengetahui secara langsung terkait program Anna Mu'awanah yang berspektif gender. Pelaksanaan program atau kebijakan gender dan dapat diketahui kekurangan maupun kelebihan selama masa kepemimpinan Anna Mu'awanah. Mengingat Anna juga merupakan ketua dari Muslimat NU cabang Bojonegoro. Muslimat NU dijadikan target karena secara tidak langsung mereka merupakan organisasi Islam yang memiliki keanggotaan perempuan. Peneliti membutuhkan informasi terkait kepemimpinan Bupatii Anna yang telah berjalan serta perjuangan Anna Mu'awanah terhadap organisasi perempuan.

- e. Lilis Apriliati S.Pd Ketua SPEAK (Suara Perempuan Penggerak Komunitas Bojonegoro) dan Awe Syaiful Huda, S.E (Direktur Bojonegoro Institut)

SPEAK merupakan LSM perempuan bentukan dari Bojonegoro Institute. SPEAK dapat memberikan informasi terkait program, kebijakan maupun sosok Anna Mu'awanah sebagai Bupati dalam merepresentasikan kepentingan perempuan. LSM perempuan dianggap dapat memberikan data yang dibutuhkan penulis karena mereka baik secara langsung dan tidak langsung mengikuti isu-isu terkait perempuan di Bojonegoro. Mereka juga memperjuangkan kepentingan perempuan. Peneliti juga ingin mendapatkan data terkait kepemimpinan Anna Mu'awanah menurut pandangan LSM perempuan. Bagaimana menurut LSM perjuangan Anna dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.

- f. Agoestin Faridjani S.H (Dinas Ketenagakerjaan)

Target informan dalam penelitian ini ialah dinas ketenagakerjaan. Dalam hal ini, mereka dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan program dilihat dari segi ekonomi. Perempuan saat ini juga banyak yang bekerja di luar domestik. Ada juga mereka yang bekerja sebagai TKW. Peneliti ingin melihat bagaimana Bupati Anna Mu'awanah melakukan perhatian dan pembelaan terkait perempuan Bojonegoro yang bekerja disektor luar rumah tangga. Untuk itu, penulis ingin mendapatkan informasi terkait ketenagakerjaan yang berhubungan dengan perempuan.

- g. Dr. Bayu Linuwih Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dijadikan target informan oleh penulis karena dalam dinas tersebut tugasnya secara universal terkait bidang perempuan dan anak. Dinas ini juga secara langsung membantu Bupati dalam menangani permasalahan maupun melaksanakan tugas terkait perempuan dan anak serta pengendalian penduduk. DP3AKB Bojonegoro terlibat secara langsung dalam membantu tugas Bupati dalam urusan perempuan, anak dan pengendalian penduduk.²²

- h. Syukur Prianto, S.E (Wakil DPRD Bojonegoro)

Keberadaan legislatif yang merepresentasikan kedalam DPRD dijadikan target oleh penulis untuk mengetahui kepemimpinan Anna Mu'awanah dari sudut pandang wakil rakyat.

²² <https://dp3akb.bojonegoro.go.id/menu/detail/16/TugasdanFungsi> (Diakses pada 3 Maret 2022).

Untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan Bupati Anna Mu'awanah untuk Bojonegoro dari analisis kebijakan maupun program kerja. DPRD dijadikan target informan juga untuk membantu penulis menemukan informasi yang objektif. Terlebih Syukur Priyanto bukan dari partai pengusung Bupati Anna Mu'awanah dan Budi Irawanto.

i. Budi Irawanto (Wakil Bupati Bojonegoro Periode 2018-2023)

Wakil Bupati Bojonegoro dijadikan peneliti sebagai salah satu informan untuk mengetahui terkait sisi-sisi kepemimpinan. Dimana, Wakil Bupati dalam hal ini terlibat secara langsung dengan Bupati Anna Mu'awanah dalam memimpin Bojonegoro. Keduanya menjadi kandidat dan pemenang pada PILBUP 2018 Bojonegoro yang diusung PKB dan PDIP. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui dari segi Wakil Bupati terkait perjalanan kepemimpinannya untuk Bojonegoro.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang nantinya dibutuhkan penulis. Untuk mendapatkan data tersebut perlu dilakukan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis terkait kepemimpinan Anna Muawanah selaku bupati perempuan pertama di Bojonegoro. Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara mendalam dengan tujuan untuk berkomunikasi dan menggali data dari informan yang dijadikan target peneliti secara langsung dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian.

b. Dokumen

Teknik pengumpulan data selanjutnya yang dilakukan penulis ialah dokumentasi. Dalam dokumentasi penulis dapat mencari data berupa catatan, buku atau artikel, transkrip dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan salah satu rangkaian penting dari penelitian. Teknik ini dilakukan jika peneliti telah mendapatkan data sekunder maupun data dari informan melalui wawancara. Analisis data dapat dilakukan dengan Model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:91) sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Dalam proses data reduksi, peneliti memilih data yang telah ditemukan yang dapat membantu peneliti. Data yang penting terkait penelitian dapat digunakan dan data yang tidak diperlukan dapat dibuang agar peneliti dapat memfokuskan pada temuan yang dibutuhkan. Data reduksi dalam hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis memilih data. Peneliti memilih data yang dapat membantu menjawab rumusan masalah serta fenomena-fenomena yang telah dijelaskan dalam latar belakang. Untuk itu dalam proses ini peneliti merasa terbantu dalam mendapatkan gambaran secara jelas mengenai apakah kepemimpinan Bu Anna Mu'awanah memiliki kemungkinan untuk merepresentasikan kepentingan yang berspektif gender, apa kepentingan-kepentingan perempuan yang telah direpresentasikan oleh Anna Mu'awanah dan apakah stereotip gender menjadi penghalang atau keuntungan bagi kepemimpinan perempuan.

b) Penyajian data

Tahap kedua setelah data direduksi ialah menyajikan data. Mendisplay data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan teks uraian singkat, tabel maupun grafik.²³ Proses penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan narasi yang telah penulis dapatkan dari informan serta menggunakan data sekunder. Tujuan mendisplay data dalam penelitian kualitatif ialah untuk membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi dan bisa digunakan untuk merencanakan agenda selanjutnya.²⁴

c) Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Teknik analisis data yang terakhir dilakukan ialah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan data dan berpondasi pada teori representasi untuk memberikan kesimpulan berupa kepemimpinan Anna di Bojonegoro sebagai bupati perempuan pertama. Kesimpulan dalam penelitian ini nantinya akan disajikan mengenai latar

²³ Sugiyono, Op. cit. hlm. 95.

²⁴ Ibid.

belakang, kepentingan yang telah direpresentasikan, kemungkinan Anna serta stereotip menjadi penghalang atau keuntungan bagi kepemimpinan perempuan.

Secara garis besar, analisis data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menyusun serta mengategorikan konsep-konsep, menyajikan data terkait kepemimpinan Anna Mu'awanah. Peneliti menggunakan teori representasi dan temuan-temuan data dari informan maupun data sekunder yang nantinya akan dijadikan kesimpulan. Data yang digunakan peneliti berasal dari wawancara mendalam, data sekunder, observasi yang nantinya akan didapat data yang ilmiah.